

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGARAN
PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN JUWIRING**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi program studi S1 akuntansi sekolah tinggi ilmu ekonomi surakarta

Disusun oleh :

CHUSNUL KHOTIMAH

20.21.0012

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

TAHUN 2024

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGARAN
PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN JUWIRING**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi program studi S1 akuntansi sekolah tinggi ilmu ekonomi surakarta

Disusun oleh :

CHUSNUL KHOTIMAH

20.21.0012

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chusnul Khotimah

NIM : 20210012

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran
Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring

Disetujui dan disahkan :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Agustus 2024

Pembimbing,



Era Trianita Saputra S.E., M.Si., M.B.A.

NIDN. 0623029402

Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi



Aditya Liliyan., S.M.B., M.M.

NIDN: 0606118

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chusnul Khotimah

NIM : 20210012

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran
Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

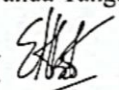
Hari : Sabtu

Tanggal : 31 Agustus 2024

Tim Penguji :

Tanda tangan

Tanda Tangan

Ketua : Era Trianita Saputra.,S.E.,M.Si.,M.B.A. ()

Anggota : Eko Triyanto.,S.E.,M.M.,M.Ak. ()

Mengetahui

Ketua STIE Surakarta



Dr.Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN JUWIRING

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 15 Agustus 2024

Yang memberi Pernyataan



Chusnul Khotimah

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmat saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-

gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, karya ini merupakan bentuk syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta. Bapak Sumadi dan Ibu Suyamti yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta, sahabat dan teman-teman saya , yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN JUWIRING ”

Shalawat senantiasa saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memperjuangkan Islam sampai pada saat ini dan menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa pengaruh dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Budi Istiyanto, S.E., M.M, M.H. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Adeviani Fiardhani, S.E., M.Ak selaku ketua program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Astuning Suharsini, S.E.,M.Acc dan ibu Era Trianit Saputra, S.E., M.Si, M.B.A. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Sekolah Ilmu Ekonomi Surakarta yang membantu dalam penyusunan skripsi.

5. Kepada kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Sumadi dan Ibu Suyamti. Terimakasih selalu memberikan dukungan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat yang tidak hentinya diberikan kepada putrinya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada cinta kasih saudara kandung saya, Alhusnah Nur Laila, S.Tr.Kes. Terimakasih atas segala doa, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan Skripsi.
7. Terimakasih buat teman dan sahabat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama untuk Novanza Romalatifa Kosofiyar dan seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dalam semua kondisi suka maupun duka.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'alla.. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. *Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Teori yang Relevan	8
1. Stewardship Theory	8
2. Kinerja Anggaran.....	8
3. Akuntabilitas	9
4. Transparasi	10
5. Pengawasan.....	11
6. Partisipasi	12
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	12
C. Kerangka Berpikir.....	16
D. Hipotesis	17
1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran	17
2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran	18
3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran	19

4. Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Waktu dan Wilayah Penelitian.....	23
B. Jenis Penelitian.....	23
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	23
D. Data dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Variabel Penelitian.....	25
1. Variabel Dependen (Terikat)	25
2. Variabel Independen (Bebas)	25
G. Definsi Operasional Variabel.....	26
H. Teknik Analisis Data.....	28
1. Uji Instrumen Penelitian	28
2. Uji Asumsi Klasik.....	29
3. Uji Ketepatan Model	30
4. Analisis Regresi Linier Berganda	31
5. Uji Hipotesis	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Penelitian.....	32
B. Deskripsi Responden Jenis Kelamin.....	32
C. Hasil Uji dan Analisis Deskriptif	33
D. Hasil Pengujian dan Analisis Data.....	34
1. Uji Instrumen	34
2. Uji Asumsi Klasik.....	36
E. Uji Ketetapan Modal	39
1. Hasil Uji F (Uji Simultan)	39
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	40
F. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	40
G. Uji Hipotesis	42
1. Hasil Uji T.....	42
H. Pembahasan Hasil Analisis Penelitian	44

1. Pengaruh Akuntabilita secara langsung terhadap Kinerja Anggaran Pemerintahan Desa(Y)	44
2. Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Kinerja Anggaran Pemerintahan Desa(Y)	45
3. Pengaruh pengawasan secara langsung terhadap Kinerja Anggaran Pemerintahan Desa(Y)	46
4. Pengaruh Partisipasi (X4) terhadap Kinerja Anggaran Pemerintahan Desa(Y)	46
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Keterbatasan	49
C. Saran	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alokasi Dana Belanja Langsung Tahun 2021 – 2022	2
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Data Kelurahan atau Desa di Kecamatan Juwiring	24
Tabel 3.2. Definisi Oprasional Variabel.....	26
Tabel 4.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 4.2. Hasil Uji Deskriptif Statistik.....	33
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas.....	34
Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas.....	36
Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas.....	36
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolienaritas.....	37
Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	38
Tabel 4.8. Hasil Uji F	39
Tabel 4.9. Uji Koefisien Determinasi.....	40
Tabel 4.10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	40
Tabel 4.11. Hasil Uji T.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	17
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner penelitian
Lampiran 2. Hasil Tabulasi
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas.....
Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGARAN
PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN JUWIRING**

Oleh : Chusnul Khotimah

NIM : 20210012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor pengaruh kinerja anggaran pemerintah, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran, pengaruh transparansi terhadap keuangan desa, dan sistem pengendalian pengawasan serta partisipasi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer dan metode pengumpulan data dengan cara kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dengan responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan dan BPD disetiap Pemerintah Desa. Desa yang menjadi objek penelitian yakni berjumlah 19 desa dengan total responden berjumlah 114 responden. Hasil statistik menunjukkan bahwa faktor pengaruh kinerja anggaran pemerintah, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran, dan sistem pengendalian pengawasan serta partisipasi terhadap berdasarkan uji t berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, sedangkan pengaruh transparansi terhadap keuangan desa tidak berpengaruh positif. Penelitian ini memberikan implikasi pada pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kinerja anggaran pemerintah desa melalui peningkatan partisipasi penyusunan anggaran oleh perangkat desa, lebih mengedepankan akuntabilitas publik, meningkatkan kinerja pemerintah desa terhadap anggaran pemerintah, adanya transparansi terhadap keuangan desa, dan sistem pengendalian pengawasan serta partisipasi yang maksimal terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat yang berada di wilayah desa penelitian untuk selalu melakukan pengevaluasian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh perangkat desa yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja anggaran pemerintah desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Anggaran, Pemerintah Desa

FACTORS AFFECTING VILLAGE GOVERNMENT BUDGET PERFORMANCE IN JUWIRING DISTRICT

By: Chusnul Khotimah

NIM: 20210012

ABSTRACT

This research aims to examine factors inFuencing government budget performance, the inFuence of accountability on budget performance, the inFuence of transparency on village finances, and the monitoring and participation control system on Village Government budget performance in Juwiring District, Klaten Regency. This research is quantitative research with primary data and data collection methods using questionnaires. This research was conducted on village officials in the Juwiring District, Klaten Regency with respondents from the Village Head, Village Secretary, Finance Head, General Head, Planning Head and BPD in each Village Government. The villages that were the object of the research were 19 villages with a total of 114 respondents. The statistical results show that the factors inFuencing government budget performance, the inFuence of accountability on budget performance, and the monitoring and participation control system based on the t test have a positive and significant effect on the performance of the Village Government budget in Juwiring District, Klaten Regency, while the inFuence of transparency on village finances has no positive effect. . This research provides implications for village governments to be able to improve the performance of village government budgets through increasing participation in budget preparation by village officials, prioritizing public accountability, increasing village government performance regarding the government budget, providing transparency in village finances, and a control system for supervision and maximum participation. on the performance of the Village Government budget in Juwiring District, Klaten Regency. The results of this research also have implications for local governments and communities in the research village area to always evaluate the work carried out by village officials which can ultimately improve the performance of the village government budget.

Keywords: Accountability, Transparency, Budget, Village Governmen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sering memandang organisasi sektor publik sebagai organisasi yang boros, rawan kebocoran keuangan, dan selalu merugi. Tuntutan masyarakat ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menjadi landasan bagi serangkaian reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bercirikan bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan pemerintahan yang akuntabel. Tanda-tanda kerugian organisasi sektor publik terlihat pada pengelolaan anggaran akibat kasus korupsi, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp144,762 triliun. (antikorupsi.org, 2019). Sejalan dengan fakta tersebut, organisasi perlu memperhatikan pengelolaan kinerja anggarannya. (Purwiyanti, 2019).

Kinerja anggaran pemerintah desa harus mampu dilaksanakan dengan maksimal dalam rangka pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam membangun desa yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tentu membutuhkan pembiayaan yang harus diawasi oleh berbagai pihak (Torau, 2019). Anggaran pemerintah desa digunakan untuk mendukung kegiatan otonomi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan (Rudiarta, 2020). Anggaran desa diperlukan pengawasan sehingga akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi diperlukan agar kinerja anggaran menjadi berkualitas.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa (Susan, 2022). Salah satu yang perlu ditingkatkan kinerja anggarannya adalah pemerintah desa di Kecamatan Juwiring, karena Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB RI, Pemerintah Kecamatan Juwiring meraih nilai CC pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022, namun masih perlu fokus pada peningkatan kinerja pemerintah desa. Salah satu permasalahan yang paling menonjol terkait kinerja organisasi pemerintah adalah kurangnya akuntabilitas dalam memberikan layanan berkualitas kepada

masyarakat (Wibowo dan Handayani, 2022). Berikut alokasi dana belanja langsung sebesar Rp2.259.669.000 untuk membiayai 5 (lima) program tahun anggaran 2021- 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Alokasi Dana Belanja Langsung Tahun 2021 - 2022

No	Program Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (%)
1	Pelayanan Administrasi (Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat)	211.832.500	95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan	12.917.500	80
	Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung dan Kantor	3.600.000	100
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	a. Penyusunan Laporan	-	-
	b. Penyusunan Laporan Akhir Tahun	-	-
4	Program Pengembangan Ekstrakurikuler	37.090.000	100
5	Program Peningkatan Kelembagaan	42.950.000	100

Sumber: Kecamatan Juwiring, 2023

Berdasarkan tabel alokasi dana belanja langsung desa di Kecamatan Juwiring tahun 2021-2022 belum semua terealisasi 100% akan tetapi dana sudah dikeluarkan secara maksimal sehingga dari tabel diatas dapat dilihat kinerja anggaran di Kecamatan Juwiring perlu ditingkatkan. Kinerja anggaran di Juwiring belum terealisasi semua karena beberapa faktor seperti kurangnya akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi.

Optimalnya kinerja anggaran pemerintah desa di Kecamatan Juwiring, sebagaimana berita yang dilansir oleh Jawapos pada bulan Februari lalu mengenai APBD Kecamatan Juwiring bahwa dana desa yang diberikan pemerintah tidak direalisasikan untuk pembangunan jalan secara maksimal, sehingga masyarakat masih merasakan jalan di desa rusak bahkan tidak bisa dilewati saat musim penghujan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja anggaran pemerintah desa dengan meningkatkan akuntabilitas perangkat desa. Perangkat desa di Kecamatan Juwiring wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan misi organisasi baik berhasil maupun gagal secara berkala melalui media pertanggungjawaban yang telah ditetapkan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Untuk mendorong transparansi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 menekankan bahwa badan publik mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi publik terkait kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan obeservasi awal, ditemukan fenomena yang terjadi di lapangan tepatnya di Kecamatan Juwiring, terkait akuntabilitas perangkat desa dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan desa yang tidak sesuai waktu selesainya pengerjaan. Penelitian Ali & Yosana (2022), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah desa. Di sisi lain penelitian Siska (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah desa.

Rendahnya kinerja anggaran juga dikarenakan belum memiliki transparansi anggaran yang baik. Dengan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap kegiatannya, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung dan mengakses informasi yang mereka butuhkan (Wardiyanti &

Budiwitjaksono, 2021). Kajian awal terkait transparansi anggaran di desa Kecamatan Juwiring selama ini terlihat stabil, artinya tidak ada peningkatan dalam menyampaikan transparansi. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan inovasi kreativitas perangkat desa dalam menyampaikan realisasi anggaran desa. Faktor internal yang mempengaruhi keterbatasan inovasi antara lain karakteristik individu seperti pusat kendali, toleransi, nilai, pendidikan, dan pengalaman, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi teladan, aktivitas, dan peluang yang ada di lingkungan.

Menurut Santika (2021), Yahya (2022), Bachri & Jumi (2020) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah desa. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu & Tampi (2022), Istikomah (2019) membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah desa. Kinerja anggaran pemerintah desa juga ditentukan oleh pengawasan. Dalam hal ini pengawasan di Kecamatan Juwiring yang belum maksimal mengakibatkan kinerja anggaran pemerintah tidak terealisasi dengan baik. Berdasarkan berita tindakan korupsi yang dilansir pada tahun 2022 Badan Pengawasan Keuangan di Kecamatan Juwiring terindikasi korupsi karena mengeluarkan pernyataan wajar tanpa pengecualian, tetapi kenyataannya tahun 2022 terdapat korupsi pada anggaran desa yang dilakukan pemerintah desa Juwiring. Menurut penelitian Ali & Yosana (2022), Maskin & Joko (2022) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah desa. Penelitian Santika (2022), Juwita (2022) menyatakan bahwa pengawasan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran.

Kinerja anggaran pemerintah desa tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran desa dan penetapan kebijakan keuangan, pemerintah desa dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif, sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan kebaikan pengelolaan anggaran desa. Partisipasi masyarakat dalam kinerja anggaran desa di Kecamatan Juwiring juga tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang realisasi dana desa. Hasil penelitian Susan (2021) bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah desa. Sedangkan pada penelitian Santika (2022), Juwita (2022) partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah desa.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsistensi, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian antara lain:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring?
4. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah dirumuskan maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran Pemerintahan Desa di Kecamatan Juwiring.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring.
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Desa di Kecamatan Juwiring.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan acuan bagi penelitian lainnya, serta menyajikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah desa, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengawasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Juwiring

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran desa, sehingga pemerintah desa dapat lebih baik dalam merencanakan anggaran mereka serta dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan desa dan memastikan penggunaan dana yang lebih efisien.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dijadikan sumber baru dan sumber pustaka untuk penelitian yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori yang Relevan

1. Stewardship Theory

Menurut teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih fokus pada mencapai tujuan utama organisasi, yaitu kepentingan organisasi itu sendiri (Donaldson dan Davis, 1991). Asumsi filosofis teori penatalayanan didasarkan pada sifat manusia yang dianggap dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas, dan berlaku jujur dalam berinteraksi dengan pihak lain. Dalam arti lain, teori *stewardship* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku dengan integritas dan bertanggung jawab untuk kepentingan publik dan umum, serta khususnya untuk kepentingan pemegang saham (*shareholders*) (Daniri, 2019). Teori ini menggambarkan adanya keterkaitan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, di mana kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan kepentingan pemilik (prinsipal) dan manajemen. Implikasi teori ini terhadap penelitian adalah pemerintah desa dapat termotivasi dan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan memiliki integritas serta jujur pada masyarakat untuk meningkatkan kinerja anggaran pemerintah daerah dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi.

2. Kinerja Anggaran

Kinerja merupakan hasil kegiatan administratif yang merupakan upaya kolaboratif yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yang biasa disebut manajemen (Mahmudi, 2019). Tujuan kinerja adalah jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan informasi kinerja tertentu untuk mengevaluasi proses kerja yang dilakukan organisasi

(Hartanto, 2019). Demikian pula dalam organisasi sektor publik, kinerja merupakan hasil kerja yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan publik, dan kontribusi ekonomi.

Kinerja pengelolaan anggaran diukur berdasarkan konsep Value For Money (VFM). Menurut penelitian Purwiyanti (2019), Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan output saja, melainkan harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara terpadu. Terdapat dua indikator dari kinerja anggaran menurut Marsdismo, (2019) antara lain sebagai berikut :

1. Alokasi biaya ekonomi dan efisien.
2. Kualitas efektivitas pelayanan.

3. Akuntabilitas

Proses pemerintahan bergantung pada akuntabilitas, yang dijamin ketika mereka berkuasa secara transparan menunjukkan tanggung jawab konstitusional dan hukum mereka (Rahmanurrasjid, 2019). Akuntabilitas adalah syarat utama untuk mencegah pengawasan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan cara yang efisien, efektif, jujur, dan bijaksana (Kutika *et al.*, 2021). Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab untuk menjelaskan dan membenarkan seluruh kegiatan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan hasilnya (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan pemahaman konseptual akuntabilitas tersebut, mempunyai relevansi yang signifikan dalam perbaikan birokrasi publik untuk memenuhi harapan publik. Menurut Yuli (2020), pemenuhan ekspektasi publik ternyata tidak semata-mata bergantung pada kemampuan birokrasi publik dalam mendefinisikan dan mengelola ekspektasi tersebut. Itu sebabnya, dalam tata pemerintahan yang baik, kontrol terhadap birokrasi publik diperlukan untuk menjamin akuntabilitas. Akuntabilitas juga berperan sebagai

alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam kebijakan publik, sehingga dapat mencapai tujuan bersama melalui pelaporan pertanggungjawaban yang teratur. Terdapat empat indikator dari akuntabilitas menurut Mahmudi, (2019) antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran.
2. Akuntabilitas proses.
3. Akuntabilitas program.
4. Kebijakan akuntabilitas.

4. Transparansi

Teori pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat menyatukan dan menyebarkan kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai (Fahri, 2021). Transparansi merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik. Dibangun atas dasar kebebasan mengakses informasi yang relevan langsung dengan kepentingan publik, yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Remaja, 2019). Menurut standar akuntansi pemerintahan, transparansi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan dan kebebasan mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat menyatukan dan menyebarkan kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan ciri utama tata pemerintahan yang baik. Sebagaimana dikemukakan Salle (2019), transparansi dibangun atas landasan kebebasan mengakses informasi yang relevan langsung dengan kepentingan publik, yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Terdapat empat indikator dari transparansi menurut Sedarmayanti, (2019) antara lain sebagai berikut:

1. Informasi memadai.
2. Terdapat akses informasi.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemerintahan.
4. Meningkatkan kepercayaan publik.

5. **Pengawasan**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan pengendalian terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan, yang bertujuan untuk menjamin perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Objek pengawasan sektor publik adalah urusan keuangan, khususnya memastikan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan pendapatan negara dan pengalokasian belanja negara sejalan dengan anggaran yang direncanakan dan tidak menyimpang dari rencana yang dimaksudkan (Mardiasmo, 2021). Dengan kata lain, pengawasan dapat dipahami sebagai kegiatan yang menjamin pengumpulan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan rencana. Merupakan proses menetapkan metrik kinerja dan mengambil tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan (Sinta, 2019). Terdapat tiga indikator dari pengawasan menurut Siagian, (2019) antara lain sebagai berikut:

1. Masukan pengawasan.
2. Pengawasan perilaku.
3. Keluaran pengawasan.

6. Partisipasi

Partisipasi mengacu pada setiap warga negara yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga sah yang mewakili kepentingan mereka. Hal ini dapat dikategorikan sebagai 'mengambil bagian' dalam pengambilan keputusan yang demokratis, mengakui hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan mengakomodasi atau menggabungkan aspirasi masyarakat (Ihyaul, 2019:31). Partisipasi melibatkan keterlibatan mental, intelektual, dan emosional individu dalam suatu situasi, memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan mengambil tanggung jawab atas aktivitas yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut (Satrio, 2020). Terdapat tiga indikator dari partisipasi menurut Soobaroyen, (2019) antara lain sebagai berikut:

1. Keikutsertaan penyusunan anggaran.
2. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran.
3. Kebutuhan memberikan pendapat.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
----	-----------------------	-------	----------	-------

1	Tarima dan Jamaluddin 2022	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintahan Kota Samarinda	Variabel: Independen Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Dependen: Kinerja Anggaran Populasi 76 Aparatur Pemerintahan.	Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.
2	Tiara dan Budiwitjaks ono 2021	The effect of competence, transparency, accountability and participation on village government performance.	Variabel independen : kopetensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi Dependen : Kinerja pemerintah desa Populasi 13 perangkat desa dan 83 masyarakat desa	Kompetensi, transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
3	Fera dan Aryanto 2021	Analisis determinasi kinerja anggaran dengan konsep value for money pada badan pengelolaan pendapatan daerah (Bappenda) kabupaten Tegal	Variabel Independen: Akuntabilitas, transparansi, pengawasan Dependen : kinerja anggaran Populasi 69 pegawai.	Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep <i>value for money</i> pada Bappenda kabupaten Tegal.
4	Harnovinsah, Al Hakim, Erlina, dan I Made 2020	Effect of Accountability, Transparency, and supervision on budget Performance.	Variabel Independen: Akuntabilitas Transparansi Pengawasan Dependen: Kinerja Anggaran Populasi 86 Aparatur Pemerintah	Akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep VFM pada SKPD DKI Jakarta. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep VFM pada SKPD

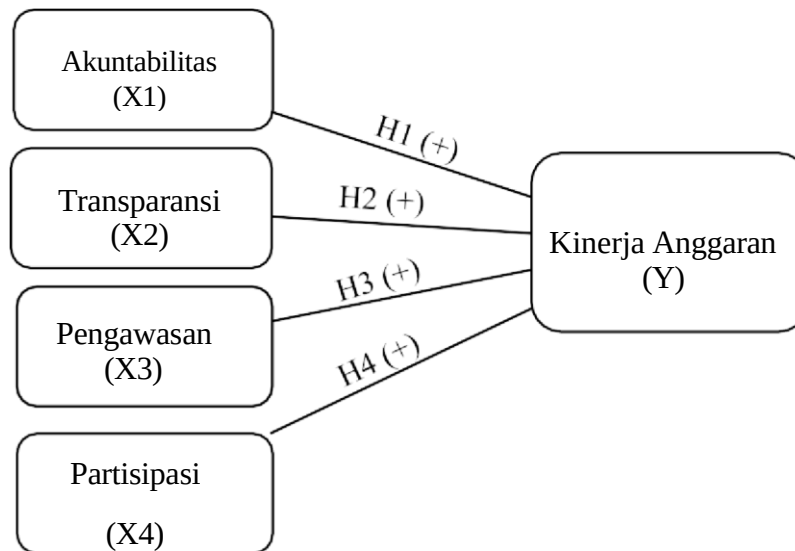
				DKI Jakarta
5	Silviana dan Nur 2020	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran	Variabel Independen: Akuntabilitas Transparansi Pengawasan Dependen: Kinerja pengelolaan anggaran Populasi 90 OPD	Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.
6	Melinda dan Dekeng 2020	Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money	Variabel Independen Akuntabilitas Transparansi Pengawasan Dependen: Kinerja Anggaran Populasi 50 OPD	Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.
7	Jumiarti, Haerudin dan Cahyono 2020	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah Luwu Timur	Variabel Independen: Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Dependen: Kinerja anggaran Populasi 112 Aparatur SKPD Kabupaten Luwu	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

8	Taye dan Ranvinderjit 2019	Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance	Variabel Independen Transpiransi, Akuntabilitas, responivitas Dependen : Kepercayaan publik Populasi 357 masyarakat kota bahir dar	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintahan daerah.
9	Suharyono 2019	The effect of accountability , transparency and supervision on budget performance by using the concept of value for money in regional busines enterpirises (BUMD) of riau province	Variabel: Independne Akuntabilitas,transparansi, dan pengaawasan.Dependen : Kinerja anggaran. Populasi 55 karyawan BUMD provinsi riau.	Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada BUMD.
10	Arifani, Salle, dan Rante 2021	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, Dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money (studi empiris	Variabel Independen Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Dependen : Kinerja anggaran Populasi 31 OPD kota jayapura	Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> . Transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> .
		pada pemerintahan kota jayapura)		

11	Ni Luh dan Ni 2019	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar	Variabel: Independen akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran Dependen : kinerja anggaran Populasi 107 SKPD kota denpasar	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh positif pada kinerja anggaran
----	--------------------	---	---	--

C. Kerangka Berpikir

Dengan mempertimbangkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengembangkan kerangka pemikiran untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi pada kinerja anggaran. Dalam penelitian ini digambarkan pengaruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel independen yang digunakan yaitu akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), pengawasan (X_3), dan partisipasi (X_4). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Menurut teori stewardship, akuntabilitas memegang peranan penting dalam kinerja anggaran pemerintah desa karena maraknya penyalahgunaan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Menurut Halim (2019:83), akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pembenaran atas kinerja dan tindakan seseorang sebagai orang perseorangan, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta informasi tersebut. Tingkat akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sebab, akuntabilitas yang lebih tinggi akan berdampak pada pengelolaan dana desa yang lebih baik. Meningkatnya akuntabilitas menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harnovinsah *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep VFM pada SKPD DKI Jakarta. Menurut hasil penelitian

Aprianti dan Asyik (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Tarima dan Jamaluddin (2022) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hermanto dan Aryanto (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Bappenda Kabupaten Tegal.

Menurut hasil penelitian Puspitasari dan Budiarto (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Saleh et al., (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pemerintah desa

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran

Penatagunaan mencakup penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan prinsip bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan (Nurhayati, 2019). Transparansi diperlukan untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaporan pengelolaan dana desa. Transparansi juga berperan dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dengan desa atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa (Robikar, 2019).

Transparansi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas akan dilaksanakan, metode apa yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas, bagaimana pelaksanaannya akan diwujudkan, dan apa dampaknya. Transparansi yang diterapkan oleh pemerintah akan mendorong pemerintah untuk bekerja

dengan baik dalam melaksanakan program pemerintah dan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Tingginya transparansi yang dimiliki pemerintah desa mengenai anggaran dana akan memberikan dampak yang baik bagi pengelolaan dana desa (Yudi, 2020).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianti dan Asyik (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Premananda et al., (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Beshi dan Kaur (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Hermanto dan Aryanto (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Bappenda Kabupaten Tegal. Suharyono (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada BUMD. Tarima dan Jamaluddin MD (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Salle et al., (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaean berbasis value for money. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pemerintah desa

3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran

Perspektif teori *stewardship*, Pemantauan sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait, sehingga menjamin pelaksanaannya secara efektif (Arifani, 2021). Pengawasan juga merupakan bentuk antisipasi pemerintah untuk mencegah

terjadinya penyimpangan sehingga kegiatan atau aktivitas pemerintah dapat berjalan baik (Aprianti dan Riharjo, 2019). Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program dan pengambilan kebijakan publik yang lebih baik, sehingga semakin tinggi pengawasan maka kinerja anggaran juga akan meningkat begitu sebaliknya jika pengawasan menurun, maka kinerja anggaran menurun. Tingginya pengawasan yang dimiliki pemerintah desa mengenai anggaran dana akan memberikan dampak yang baik bagi pengelolaan dana desa (Yudi, 2020). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran karena pengawasan dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang secara efektif (Arifni, 2021; Purwiyanti, 2019; Pertiwi, 2019; Damayanti, 2021). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pemerintah desa

4. Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran

Partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan yang sah, sehingga setiap warga negara memiliki hak suara yang efektif. Partisipasi dapat dikategorikan sebagai “mengambil bagian” dalam pengambilan keputusan secara demokratis, mengakui hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers (Ihyaul, 2019) . Menurut penelitian Kartika (2019), partisipasi dalam proses perencanaan anggaran berdasarkan kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi anggaran dan motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Keterlibatan dalam penganggaran diyakini dapat meningkatkan kemampuan manajerial atasan di suatu tempat kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja

pemerintah secara keseluruhan. (Hermaningsih, 2019;21). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Premananda et al., (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif pada kinerja anggaran. Jamaluddin et al., (2022) menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pemerintah desa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisis data yang telah diultraikan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Pemerintahan Desa dari Kecamatan Juwiring.
2. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Transparansi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja dari Kecamatan Juwiring.
3. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Pemerintahan Desa dari Kecamatan Juwiring.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Pemerintahan Desa dari Kecamatan Juwiring.

B. Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jangkauan penelitian yang relatif kecil (19 Desa), tidak digunakannya metode wawancara sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail serta variabel penelitian yang relatif sedikit.
2. Sampel penelitian ini dilakukan dalam lingkup satu wilayah kabupaten namun hanya diambil beberapa desa sebagai objek penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil lebih banyak desa atau seluruh desa supaya dapat digeneralisasi dalam lingkup wilayah yang lebih luas.
3. Kompleksnya tugas aparatur desa dan keterbatasan waktu penelitian menyebabkan jawaban yang diberikan aparatur desa selaku responden dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol secara pasti apakah jawaban responden jujur atau tidak.

C. Saran

Dengan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel dalam objek penelitian perlu diperluas agar diperoleh gambaran yang lebih luas.
2. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan teori, metode, instrumen pengujian yang lebih disukai untuk penelitian lebih memperbanyak sampel pada penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, J., dan Saleh. (2020). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Utara. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 15-111.
- Ahmad, Daniri. (2005). Konsep dan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Konteks Indonesia. Indonesia: Ray Indonesia
- Aprianti, S., & Asyik, N. F. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1-21.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4193>.
- Arifani; Salle, dan Rante. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, dan Pengawsan Terhadap kinerja Anggaran Berbasis Value for Money (Studi Empiris pada Pemerintah Jayapura. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(1), 704-713.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2019). Kepercayaan Publik pada Pemerintah Daerah : Menjelaskan Peran Praktik Tata Kelola yang Baik. *JUrnal Tinjauan Organisasi Publik*, 2(1), 337-350.
- Budiarto, D. S., & Puspitasari, M. D. (2020). Meningkatkan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Accounting Global Jurnal*, 4(2), 153-166
- Damayanti, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(3): 1-21.
- Fahri.M. (2020) Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone
- Harnovinsah, Hakim, Erlina, dan Muda. (2020). *Effect of Accountability, Transparency and Supervision on Budget Performance*. 25(7).
- Kutika, N., Posumah, J. H., Mambo R. (2021). Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Malalayang Kota Manado.
- Lukito, PK. (2020). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan berdemokrasi ke depan. Grasindo
- Mahmudi. (2020). Manajemen Kinerja Sektor Publik. STIM YKPN. Jakarta.

- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta
- Mardiana. (2020). Analisis Anggaran dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 35–42.
- Pakaya, J. S. (2020). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84.
- Pertiwi, D.P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Studi Empiris Skpd Provinsi Riau. *Jurnal online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 2(2): 1-5
- Premananda, N. L. P. U., & Latrini, N. M. Y. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2451–2476.
- Priyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing.
- Puspawardani, W. (2020). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Kabupaten Pangandaran*, 1(1), 1–8.
- Purwiyantanti, D.P (2020). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggola Kodi Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis* 5(3): 190-200
- Putri, A. C. P., & Akbar, F. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 14–25.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik di Daerah*. Tesis Universitas Diponegoro.
- Remaja, I. N. G. (2020). *Hukum Administrasi Negar*. Penerbit Universitas Panji Sakti.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>

- Salle, A. (2020). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyono. (2019). *The effect of Accountability, Transparency, and Supervision on Budget Performance by Using The Concept of Value for Money in Regional Business Enterprises (BUMD) of Riau Province* 4(2), 236-249.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- V. R Tarima., & Jamaluddin MD. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Samarinda.
- Wardiyanti, T. K., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). The Effect of Competence, Transparency, Accountability, and Participation on Village Government Performance. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 469–

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan Jabatan :

Desa :

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Dimohon saudara atau saudari untuk membaca setiap pertanyaan kuesioner secara hati-hati dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini dengan lengkap, kemudian diberikan tanda centang (✓) pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Saudara/Saudari pada kolom yang tersedia. Kuesioner ini terdapat 5 pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan, yaitu :

1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 4 : Setuju (S)

2 : Tidak Setuju (TS) 5 : Sangat Setuju (SS)

3 : Netral (N)

Kinerja Anggaran (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu					
2	Anggaran dikelola secara adil dan merata dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas					
3	Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik					
4	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif					
5	Penerapan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran					

Sumber: Harnovinsah, *et al* (2020)

Akuntabilitas

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat					
2	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat					
3	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran					
4	Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya					

Sumber: Mahmudi (2017)

Transparansi

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
2	Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran					
3	Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu					
4	Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik					

Sumber: Harnovinsah *et al* (2020)

Pengawasan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan anggaran					
2	Aspirasi masyarakat mengenai dasar dalam rangka penyusunan anggaran					
3	Pengawasan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal					
4	Revisi anggaran dilakukan dengan alasan skala prioritas					

Sumber: Aprianti & Asyik (2020)

Partisipasi

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program penggunaan dana desa					
2	Saya terlibat dalam setiap penyusunan anggaran					
3	Masyarakat mengusulkan rencana anggaran alternatif untuk BPD terhadap rancangan anggaran					
4	Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran desa					

Sumber: Premananda dan Latrini (2017)